

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi dan Profil Kependudukan Kabupaten/Kota merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Provinsi dan salah satu kewenangan Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Profil Perkembangan Kependudukan merupakan gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Profil Perkembangan Kependudukan Skala Provinsi disusun berdasarkan Profil Perkembangan kependudukan Kabupaten/Kota dan dari lintas sektor yang terkait. Sedangkan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten/Kota disusun berdasarkan data registrasi yang diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang kemudian dibersihkan dan dikonsolidasikan oleh Tim Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk menghasilkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk kemudian diolah sesuai kebutuhan sebagai bahan untuk penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Selain itu, Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten/Kota juga disusun berdasarkan data dari lintas sektor terkait.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (10) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan menyatakan bahwa penyusunan Profil

Perkembangan Kependudukan dilakukan setelah sumber daya manusia yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota mendapatkan bimbingan teknis penyusunan profil perkembangan kependudukan.

Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan terakhir kali dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri adalah pada tahun 2015, sedangkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pernah melaksanakan Bimtek ini pada tahun 2017.

Dari supervisi penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten/Kota didapatkan hasil bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota masih belum menyajikan dan menyusun Profil Perkembangan Kependudukannya sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah yang ada baik dari substansi, sistematika, pengolahan, maupun ketepatan waktu penyelesaian penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan sehingga personil tim penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten/Kota menyarankan agar Provinsi dapat kembali memfasilitasi terlaksananya Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan agar seluruh tim penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki pemahaman serta dapat mengolah, menganalisa, menyajikan, dan menyusun Profil Perkembangan Kependudukan sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada.

Sejalan dengan itu, guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa data kependudukan harus digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan, maka dengan dilaksanakannya Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan dapat menghasilkan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan data dan informasi berguna untuk proses lebih lanjut dalam

perencanaan, alokasi anggaran, pelayanan publik, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal bagi pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan di Sumatera Barat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 ini adalah agar Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, mulai dari substansi isi, sistematika penyusunan, cara pengolahan dan ketepatan waktu penyelesaian penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Sedangkan tujuan kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mulai dari mengolah, menganalisa, dan menyajikan data perkembangan kependudukan baik yang berasal dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kemendagri dan data pendukung yang berasal dari OPD/Instansi Teknis Terkait.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 ini adalah :

1. Koordinasi dan pendalaman teknis terkait jadwal dan materi Bimtek dengan Narasumber dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Narasumber Daerah dari OPD/Instansi teknis terkait.

2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019.

D. KELUARAN (*OUTPUT*)

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Kependudukan sebanyak 60 (enam puluh) orang dengan masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang peserta yang terdiri dari Kasi SIAK, Kasi Pengolahan Data/Kasi yang terlibat dalam proses penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, dan Administrator Database (ADB) di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.

E. ANGGARAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 ini ditunjang oleh dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp.85.630.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Persiapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 ini meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
2. Pembentukan tim pelaksana kegiatan bimtek penyusunan profil kependudukan tingkat Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor 473/03/DPPKKBKPS.5/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
3. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 di Ruang Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, dengan hasil rapat yang dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

B. PEMBAHASAN TEKNIS PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN KE DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENDAGRI

1. Kegiatan pembahasan teknis pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Profil Kependudukan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri, Jakarta ini dilaksanakan pada tanggal 13-15 Februari 2019.

2. Kegiatan dilaksanakan agar pelaksanaan Bimtek Penyusunan Profil dapat tepat sasaran dan mencapai hasil yang ditargetkan, sehingga perlu pembahasan secara teknis dengan Tim Penyusunan Profil Nasional di Ditjen Dukcapil Kemendagri mulai dari waktu pelaksanaan, ketersediaan waktu narasumber pusat yang akan menyampaikan materi, serta metode dan materi yang akan disampaikan pada Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan.
3. Hasil pembahasan teknis pelaksanaan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan ini dibuat dalam sebuah Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana terlampir dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini.

C. BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN

1. PELAKSANAAN

- a. Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan ini dilaksanakan dari tanggal 4 s.d. 6 Maret 2019 dengan waktu efektif Bimtek sebanyak 2 (dua) hari bertempat di Hotel Amaris, Padang,
- b. Bimtek dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumatera Barat dengan susunan acara kegiatan Bimtek sebagai berikut :
 - 1) Pembukaan :
 - a) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 - b) Laporan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis.
 - c) Sambutan, arahan, sekaligus Pembukaan Bimtek oleh Kepala Dinas.
 - d) Pembacaan Doa.

- 2) Pelaksanaan Bimtek melalui penyampaian materi bimtek menjadi 4 (empat) sesi oleh Narasumber Pusat dan Daerah dan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Moderator pada setiap sesinya.
- 3) Penutupan dilakukan secara resmi oleh Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.
- 4) Dari 60 (enam puluh) peserta yang diundang untuk mengikuti bimtek yaitu masing-masing 3 (tiga) orang dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, 52 (lima puluh dua) orang yang hadir dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Provinsi mengikutsertakan 3 (tiga) orang peserta.
 - b) 14 Kabupaten/Kota mengirimkan masing-masing 3 (tiga) orang peserta.
 - c) 3 Kabupaten/Kota mengirimkan masing-masing 2 (dua) orang peserta, yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, dan Kota Bukittinggi.
 - d) 1 Kabupaten mengirimkan 1 (satu) orang peserta yaitu Kabupaten Sijunjung.
 - e) 1 Kabupaten tidak mengirimkan peserta sama sekali yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 5) Bimtek dilaksanakan di Hotel Amaris, Jl. Jend. Sudirman No.19, Padang, termasuk akomodasi penginapan peserta.

2. NARASUMBER DAN MATERI BIMTEK

Adapun Narasumber dan Materi Bimtek yang disampaikan oleh masing-masing Narasumber disajikan dalam matriks berikut :

No	Narasumber/Judul Materi	Isi Pokok Materi	Tanggapan dan Pertanyaan Peserta	Saran Narasumber
1.	Ati Kadarwati, S.H., M.H. (Ditjen Dukcapil Kemendagri) Kebijakan Profil Kependudukan (Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan)	<p>1. Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 26 ayat (3) UUD 1945. 2. Pasal 49 UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 3. Pasal 50 ayat (3) UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 4. Pasal 5 huruf e UU No. 23/2006 Tentang Adminduk dan Pasal 3 huruf e PP No.37/2007 ttg Pelaksanaan UU No.23/2006 Tentang Adminduk. 5. Pasal 6 huruf d UU No. 23/2006 Tentang Adminduk dan Pasal 11 huruf d PP No. 37/2007 ttg Pelaksanaan UU No. 23/2006 Tentang Adminduk. 6. Pasal 7 huruf g UU No. 23/2006 Ttg Adminduk dan Pasal 17 huruf g PP No. 37/2007 ttg Pelaksanaan UU No. 23/2006 Tentang Adminduk. 7. Pasal 9 huruf d UU No. 23/2006 Tentang Adminduk. 8. Penyajian data dan infoduk dimaksud disajikan dalam bentuk PROFIL BANGDUK yang diatur dalam : <i>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.</i> 9. UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. <p>2. Sumber Data Kependudukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi (hasil daftduk dan capil, dimana validasi data masih perlu ditingkatkan). 2. Non Registrasi (sensus dan survey). <p>3. Peran Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai data dasar (untuk prakiraan & proyeksi). 2. Sebagai alat monitoring (fungsi kontrol). 3. Sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan (fungsi planning). 4. Sebagai alat untuk evaluasi kinerja (fungsi efisiensi). 	<p>1. Kabupaten Lima Puluh Kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Keterkaitan antara Pasal 12 : “data yang dipergunakan sebagai data dasar hasil pendataan akhir bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun yang sama pada pukul 177.00 waktu setempat, dan Pasal 25 ayat (1) : “Bupati/Walikota melaporkan Profil Perkembangan Kependudukan skala Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lambat bulan Maret. Jadi sebenarnya kapan waktu penyelesaian Profil Kependudukan Kabupaten/Kota. b) Tusi penyusunan Profil ada dimana, karena di Kab.50 Kota, Tusi tersebut bersarkan Perbup berada di Seksi Kerjasama (Bidang Pemanfaatan Data). 	<ol style="list-style-type: none"> a) Karena Permendagri ini disusun pada tahun 2010 dimana DKB belum ada, maka maksud dari pasal 12 adalah “data pelayanan”, namun untuk saat ini yang digunakan adalah Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II setiap tahunnya, dan pelaporan memang dilakukan pada bulan Maret tahun berikutnya. Namun untuk waktu pelaporan ini karena banyaknya saran dari semua pihak, saat ini masuk dalam salah satu yang akan direvisi karena DKB yang biasanya baru keluar paling cepat bulan Januari, sehingga bila bulan Maret harus sudah selesai, hal ini akan memberatkan Kabupaten/Kota. b) Tusi Penyusunan Profil sebenarnya ada di Bidang PIAK, namun bila sudah ada Perbup terkait Tusi tersebut, maka laksanakan saja sesuai Perbup tersebut. Kecuali bila nanti Perbup tersebut sudah dicabut, maka bisa disesuaikan kembali dengan Tusi yang sebenarnya yaitu di Bidang PIAK.

		<p>5. Sebagai indikator keberhasilan yang dicapai (fungsi targetting). <i>Semuanya itu memerlukan data yang valid, akurat, uptodate, periodik, kontinyu, dan dapat dipertanggungjawabkan.</i></p> <p>4. Profil Kependudukan disusun untuk menyajikan data dan memberikan informasi perkembangan kependudukan di suatu wilayah.</p> <p>5. Profil Kependudukan menyajikan gambaran mengenai penduduk dan indikator kependudukan yang terdiri dari :</p> <p>a. Kuantitas Penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk. • kelahiran, kematian, dan perkawinan, perceraian. <p>b. Kualitas Penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik sosial (pendidikan dan kesehatan serta KB, ekonomi, ketenagakerjaan, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial). <p>c. Mobilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, arah dan volume migrasi dan mobilitas permanen. <p>d. Kepemilikan Dokumen Kependudukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil . <p>e. Data Penduduk dengan kategori khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan karakteristik penduduk dengan kondisi kecacatan, penduduk dengan kebutuhan khusus, penduduk miskin. <p>6. Hal-hal yang dimuat dalam Profil Kependudukan adalah :</p> <p>1. Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan; tujuan; ruang lingkup; dan pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan.</p>	<p>2. Kabupaten Tanah Datar :</p> <p>a) Bolehkah data yang disajikan dalam Profil Kependudukan disajikan secara series seperti yang dilakukan oleh BPS, karena ada beberapa pengguna data yang meminta hal tersebut. Kalau boleh sebaiknya untuk berapa tahun data series tersebut disajikan karena semakin lama Buku Profil akan semakin tebal dengan adanya data series tersebut.</p> <p>b) Ada data lintas sektoral yang tidak bisa didapat yaitu terkait jumlah siswa SLTA karena sudah beralihnya kewenangan SMA ke Provinsi. Kalau bias mohon fasilitasi dari Dinas Provinsi untuk mendapatkan data-data tersebut.</p> <p>c) Anggaran yang dialokasikan untuk penyusunan Profil Kependudukan hanya dikelola dalam satu kegiatan di Sekretariat sehingga sulit dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bila memungkinkan</p>	<p>a) Data boleh disajikan secara series, namun sebaiknya maksimal hanya 3 (tiga) tahun saja, karena di dalam Profil dilengkapi dengan analisa-analisa, sedangkan data BPS hanya berupa tabel-tabel saja tanpa ada analisa sehingga bias dibuat sampai 5 tahun data seriesnya.</p> <p>b) Data terkait lintas sektoral dinas pendidikan ini sebenarnya tidak perlu diminta lagi ke Disdik karena data-data tersebut bias langsung diolah dengan data DKB yang ada di Dukcapil. Namun bila memang masih ingin menggunakan data-data tersebut agar lebih update, maka Provinsi akan memfasilitasi permintaan data-data tersebut dan akan memberikannya ke Kabupaten/Kota yang membutuhkan.</p> <p>c) Seharusnya penganggaran untuk kegiatan penyusunan Profil ini dikelola langsung oleh Bidang yang mempunyai Tusi tersebut agar dapat dianggarkan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan.</p>
--	--	---	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Gambaran Umum Daerah, memuat letak geografis daerah; kondisi demografis daerah; gambaran ekonomi daerah; dan potensi daerah. 3. Sumber Data, registrasi dan data lintas sektor terkait. 4. Perkembangan Kependudukan (kuantitas, kualitas, dan mobilitas). 5. Kepemilikan Dokumen Kependudukan (dokumen daftuk dan capil). 6. Kesimpulan, menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi daerah berdasarkan telaahan dan analisis. 7. Pelaporan Profil Kependudukan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur pada bulan Maret. 2. Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri pada bulan Juni. 3. Menteri Dalam Negeri mempublikasikan profil perkembangan kependudukan nasional. 8. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun Profil Kependudukan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Infrastruktur, yakni : <i>petugas yang mampu mengolah, menganalisis dan menyajikan data, paket program pengolahan data statistik dll.</i> 2. Memperbaiki data anomali. 3. Memahami indikator-indikator kependudukan. 4. Memahami tata cara penyajian data. 	<p>dana penyusunan Profil bias dikelola langsung oleh Bidang yang mempunyai Tusi dalam penyusunan Profil tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kabupaten Solok <ol style="list-style-type: none"> a) Profil Kependudukan yang disusun oleh masing-masing daerah ini apakah diperuntukan hanya untuk stakeholder saja atau masyarakat luas bisa mendapatkannya juga. b) Selain dalam bentuk buku, apakah Profil Kependudukan ini dapat juga disajikan dalam bentuk media lain seperti disket, CD, flashdisk, dll. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Untuk saat ini, karena keterbatasan anggaran di masing-masing daerah untuk mencetak dan mendistribusikan Profil, memang sebagian besar Profil hanya diperuntukan bagi stakeholder yang berkaitan langsung dengan data-data tersebut, seperti unsur pimpinan daerah, OPD lingkup masing-masing daerah. Namun kedepannya Profil ini diharapkan juga akan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan data-data kependudukan. Namun, bagi masyarakat yang memang membutuhkan data dapat datang langsung ke Dinas Dukcapil atau melalui media informasi seperti website. b) Profil Kependudukan bisa disajikan dalam bentuk media lain, untuk Provinsi sendiri selain dalam bentuk buku juga sudah menjadikan dalam bentuk CD. Selain itu juga bisa disajikan dalam website dinas
--	--	--	--	---

			<p>4. Provinsi : karena adanya keberagaman judul Profil yang ada saat ini, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi terkait tampilan judul untuk Profil Perkembangan Kependudukan apakah Profil Perkembangan Kependudukan berdasarkan tahun data atau tahun pembuatan, dan penetapan (penandatanganan) nya saat Profil selesai atau per tanggal cut off data (per 31 Desember)</p>	<p>atau website daerah, agar lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun berada.</p> <p>4. Berdasarkan keputusan bersama, maka disepakati untuk judul menggunakan tahun data tetapi dibawah dibuat tahun pembuatannya. Untuk tanggal penetapan dan penandatanganan adalah tanggal saat Profil Kependudukan tersebut selesai disusun.</p>
2.	<p>Dra. Srie Roesiana Dwi Mardiatutie, M.Si. (Ditjen Dukcapil Kemendagri) Langkah-Langkah Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Memberikan contoh Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan oleh Kabupaten Cimahi yang dalam pengolahan, analisa dan penyajian datanya dibimbing dan didampingi langsung oleh Narasumber.</p> <p>2. Memberikan contoh langsung cara mengolah data melalui pivot tabel dengan urutan pengolahan sebagai berikut :</p> <p>a) DKB yang ada diolah terlebih dahulu dan disajikan by name by address sesuai dengan elemen data yang ada dalam Biodata WNI dan disajikan pada excel (untuk jumlah penduduk s/d 1jt), bila tidak mencukupi jumlah baris dalam excel untuk menampung data tersebut (untuk Provinsi), bisa menggunakan Microsoft access.</p> <p>b) Data-data yang telah tersaji tersebut, dilakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap semua data-data anomali yang ada, karena meskipun</p>	<p>1. Bila memang ada data sektoral yang sebenarnya juga bisa diolah dan disajikan dari data Dukcapil saja, maka sebenarnya data-data sektoral apa saja yang masih harus diminta ke OPD teknis untuk melengkapi data-data dalam Profil Kependudukan.</p> <p>2. Setelah adanya pembersihan data anomali, maka data yang disajikan akan mengalami perubahan dan perbedaan dengan data Pusat, apakah hal ini dibenarkan.</p>	<p>1. Data-data sektoral yang masih bisa diminta adalah :</p> <p>a) Dinas Pendidikan : (APS, AMH).</p> <p>b) Dinas Kesehatan (Angka Kematian Ibu, bayi, dan anak).</p> <p>c) Dinas Nakertrans (data transmigrasi).</p> <p>d) Dinas Sosial (Data PMKS).</p> <p>2. Secara jumlah data tidak akan berbeda dengan data yang diolah dan disajikan Pusat, namun secara rincian pasti akan ada perbedaannya, seperti dari data pendidikan dan pekerjaan, karena data</p>

		<p>DKB, namun masih banyak terdapat data anomali didalamnya.</p> <p>c) Setelah data bersih, maka data-data tersebut dapat diolah sesuai dengan kebutuhan data yang ingin disajikan dalam Profil Perkembangan Kependudukan.</p> <p>3. Sebagai contoh dalam mengolah data menggunakan pivot, digunakan data Kabupaten Cimahi. Bagi peserta yang sudah memiliki data by name by address yang sudah bersih, bisa langsung mempraktekan pengolahan data melalui pivot tabel ini.</p> <p>4. Disampaikan juga bahwa data pendidikan (APM dan APK) dapat diolah langsung menggunakan data-data yang ada di Dukcapil, sehingga tidak perlu meminta lagi ke Dinas Pendidikan. Hanya data Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melek Hukum (AMH) yang masih perlu diminta dari Dinas Pendidikan. Untuk itu, juga langsung dicontohkan cara mengolah APM dan APK dengan menggunakan data yang ada di Dukcapil melalui pivot tabel.</p> <p>5. Selain mengolah data dengan pivot, juga disampaikan cara membuat Piramida Penduduk yang menarik untuk disajikan sehingga Profil Perkembangan Kependudukan yang tersaji menjadi buku yang menarik dibaca dan akhirnya akan dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan terkait kependudukan.</p> <p>6. Satu yang sebaiknya juga bisa disajikan dalam Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah data proyeksi untuk 5 (lima) tahun ke depan, karena biasanya pengguna data (pengambil kebijakan) sangat memerlukan proyeksi data ini untuk menentukan kebijakan strategis jangka menengah di daerah masing-masing.</p> <p>7. Menyarankan :</p> <p>a) Pembersihan data anomali sebaiknya harus</p>	<p>3. Apa saja yang selanjutnya harus dilakukan terhadap data-data anomali tersebut</p>	<p>anomali nya sudah kita bersihkan. Sebagai contoh : Anak usia 15 tahun dalam data pendidikan “Belum Tamat SD” tapi di pekerjaan “Pelajar/Mahasiswa”</p> <p>3. Data-data anomali tersebut dikumpulkan, lalu dilakukan konfirmasi langsung ke penduduk yang bersangkutan, dan disinilah dibutuhkan waktu agar data anomali tersebut menjadi data yang wajar sebelum selanjutnya diolah dan disajikan sebagai data untuk Profil Perkembangan Kependudukan.</p> <p>(contoh data-data anomali terlampir).</p>
--	--	---	---	--

		<p>dilakukan sebelum data diolah dan disajikan.</p> <p>b) Data sebaiknya diolah dengan pivot tabel, karena lebih mudah, namun bila ada yang bisa mengolah langsung dengan script, sebaiknya sama-sama belajar mengolah dengan script tersebut bukan hanya sekedar mengcopy paste script saja, agar semua memiliki pemahaman yang sama tentang script.</p> <p>c) Agar Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyediakan waktu untuk duduk bersama dalam mengolah data sebagai bahan untuk Profil Perkembangan Kependudukan ini mulai dari pembersihan data anomali sampai mengolah dan menganalisa datanya (seperti konsinyir) agar dapat lebih fokus dengan waktu paling tidak selama satu minggu (5-7 hari) agar data yang dihasilkan nantinya benar-benar bersih, akurat dan valid antara data Kabupaten/Kota dan Provinsi, sehingga pada saat kembali ke tempat masing-masing hanya tinggal melakukan finalisasi saja.</p> <p>d) Sebaiknya dalam Profil juga bisa disajikan proyeksi data untuk 5 (lima) tahun kedepan, untuk hal ini karena akan ada Narasumber dari BPS, sebaiknya langsung ditanyakan saat sesi penyampaian materi dari BPS tersebut.</p>		
3.	<p>Yulitri Susanti, S.Pi. (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat). Proses Pengumpulan, Pengolahan dan Sinkronisasi Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian</p>	<p>1. Penyamaan persepsi terkait Angkatan Kerja, dimana Kelompok tenaga kerja adalah penduduk berusia produktif yaitu berusia antara 15 - 64 tahun, yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu :</p> <p>a) Kelompok angkatan kerja adalah penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan.</p> <p>b) Kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan misalnya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga,</p>	<p>1. Kab. Dharmasraya : Disnakertrans Kab. Dharmasraya tidak pernah bisa memberikan data setiap kali diminta, bahkan meminta data yang seharusnya menjadi data teknis mereka ke Disdukcapil, apakah memang Disnakertrans tersebut tidak mempunyai data-data teknis sendiri? Bisakah Disnakertrans</p>	<p>1. Memang itulah kendala yang juga dirasakan oleh Dinas Provinsi saat meminta data dan laporan ke Kab/Kota, sehingga pada akhirnya harus mengumpulkan dan turun langsung ke lapangan untuk bisa mendapatkan data-data tersebut. Bila Disdukcapil Dharmasraya tidak bisa</p>

		<p>dan pensiunan.</p> <p>2. Sama halnya dengan Dukcapil, sebagian besar data ketenagakerjaan (data utama) juga diolah dan disajikan oleh BPS yang dihasilkan dari Susenas, sehingga terdapat perbedaan persepsi tentang angkatan kerja menurut statistic yaitu ANgkatan kerja adalah penduduk berusia diatas 15 tahun. Data ketenagakerjaan yang disajikan oleh BPS diantaranya adalah :</p> <p>a) Jumlah Angkatan Kerja b) Jumlah Bekerja c) Jumlah Pengangguran</p> <p>dimana data terakhir menurut BPS per Agustus 2018, jumlah Angkatan Kerja di Sumatera Barat adalah sebesar 2.552.130 orang, dimana 2.410.450 orang (94,45%) adalah Bekerja dan sisanya sebesar 141,680 orang (5,55%) adalah Pengangguran Terbuka.</p> <p>3. Namun, ada data-data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian khusus yang diolah dan dihasilkan oleh Disnakertrans yang bersumber dari data-data Kabupaten/Kota, diantaranya adalah :</p> <p>a) Data pelatihan keterampilan di BLK Kab/Kota (ada 12 Kab/Kota) b) Data pencari kerja , lowongan dan penempatan yang terdaftar c) Data tentang Izin mepekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) d) Data Tentang pemagangan dalam dan luar negeri e) Data jumlah perusahaan skala dan modal perusahaan f) Data tenaga kerja di perusahaan berdasarkan jenis kelamin g) Data jumlah kasus ketenagakerjaan h) Data penempatan warga transmigrasi di kawasan SP di Sumbar i) Data kegiatan pelatihan di daerah transmigrasi.</p>	<p>Provinsi memfasilitasi permintaan dan pemenuhan data-data tersebut.</p> <p>2. Provinsi :</p> <p>a) Persepsi Angkatan Kerja sudah sama, tapi data di buku tenaga kerja yang ada masih menggambarkan kalau Angkatan Kerja tersebut adalah penduduk diatas 15 tahun.</p> <p>b) Data terkait transmigrasi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan data yang diberikan oleh Disnakertrans, jadi data transmigrasi apa saja yang bisa diberikan terkait kebutuhan untuk Profil.</p> <p>c) Buku data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Prov. Apakah sudah sinkron dengan data di Kab/Kota, sehingga bisa digunakan oleh Disdukcapil Kab/Kota bila menemui kesulitan dalam meminta data ke masing-masing Disnaker dan Disnakertrans di daerahnya.</p>	<p>mendapatkan data dari Disnakertrans Kab. Dharmasraya, Dinas Provinsi melalui DPPKBKPS siap membantu untuk memfasilitasinya.</p> <p>a) Buku terakhir yang disusun adalah data tahun 2017, dan mulai tahun 2018, untuk Angkatan Kerja akan disesuaikan dengan persepsi yang sudah sama seperti yang telah disampaikan pada paparan yaitu usia 15-64 tahun.</p> <p>b) Data transmigrasi yang ada saat ini adalah terkait pola tanaman pangan dan transmigrasi lahan kering serta penempatan transmigrasi.</p> <p>c) Buku tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ini merupakan data dan laporan yang dihasilkan dari Kab/Kota baik yang langsung dilaporkan oleh masing-masing Kab/Kota maupun yang diperoleh oleh Dinas Provinsi dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Jadi seharusnya data-data yang ada di Kab/Kota juga sama dengan data-data yang ada di Provinsi sehingga bisa juga</p>
--	--	--	---	--

		<p>4. Kendala yang sering ditemui dalam proses penyajian laporan terkait data-data ketenagakerjaan dan transmigrasi ini, antara lain adalah :</p> <p>Validitas Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan oleh Bidang Teknis Dinas Provinsi, laporan dari Disnakertrans Kab./Kota serta instansi lain yang berkaitan (BNP2TKI, PT Jamsostek, BPS, dll.); • Implikasinya adalah tingkat validitas data tergantung dari kualitas pengumpulan data instansi yang bersangkutan. <p>Reliabilitas Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber data bermacam-macam, kadang setiap instansi mempublikasikan angka yang berbeda; • Kurangnya pemahaman petugas entry data dari kab./kota terhadap konten laporan yang harus diisi. <p>5. Solusi yang telah dilakukan terkait kendala tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan verifikasi data di Bidang Teknis Dinas Provinsi serta Subbagian Program & Keuangan; • Menyelenggarakan Rakornis Petugas Focal Point se-Sumatera Barat untuk memberikan bantuan teknis pengisian laporan. <p>6. Selain itu juga terdapat beberapa kendala dalam penyampaian laporan data-data tersebut, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Provinsi, sulit mendapatkan data yang lengkap dan cepat serta kekeurangan SDM pengelola data. ▪ Tingkat Kab./Kota, Laporan dari 19 kab./kota sering terlambat disampaikan ke Provinsi serta kekurangan SDM pengelola data. <p>Adapun Solusi yang telah dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Provinsi dengan merevitalisasi jaringan Teknoligi Informasi (TI) dan mengembangkan sistem pelaporan online. - Tingkat Kab./Kota, memberi insentif kepada petugas Focal Point Kab./Kota dari dana APBD 	<p>d) Karena Profil Kependudukan harus siap pada bulan Maret (untuk Kab/Kota) dan bulan Juni (untuk Provinsi), apakah Disnakertrans telah dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk Profil pada awal tahun.</p>	<p>digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kab/Kota.</p> <p>d) Data selalu ada setiap saat namun kondisi data yang mungkin tidak akan selalu update, karena harus menunggu laporan dari Kab/Kota, namun akan diusahakan untuk selalu memberikan data yang terakhir.</p>
--	--	---	--	---

		<p>Provinsi serta diseminasi serta pemantauan secara periodik kepada Kabupaten/kota.</p> <p>7. Terkait permintaan data dari DPPKBKPS sebagai data pendukung untuk Profil Perkembangan Kependudukan, Disnakertrans akan berusaha untuk memenuhinya sesuai dengan substansi dan format yang dibutuhkan. Dan bagi Kab/Kota yang juga membutuhkan data di Dinas Tenaga Kerja masing-masing Kab/Kota bila menemui kendala, Disnakertrans Prov. Siap untuk membantu memfasilitasinya.</p>		
4.	<p>Krido Saptono, S.Si, M.Si. (BPS Provinsi Sumatera Barat). Pengolahan, Analisis Data dan Penyajian Publikasi.</p>	<p>1. Jenis-jenis Publikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku. Pamflet (flyer, leaflet, brosur, buklet). <p>2. Proses pembuatan Publikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan. Pengumpulan Data. Pengolahan Data. Analisis. <p>3. Analisis dan Diseminasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis (deskriptif dan inferensia). Diseminasi : <ol style="list-style-type: none"> Tercetak (laporan, leaflet, buku) Digital (website, aplikasi mobile, e-book). <p>4. Bentuk-bentuk Diseminasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tabel, bisa memuat banyak data dan lebih sulit dibaca. Grafik, menarik untuk dibaca, namun data terbatas. Infografis, menarik dibaca dan informatif. Infografis dimanis (video grafis), menarik dilihat, informatif dan tidak membosankan. <p>5. Syarat Grafik yang baik adalah harus menarik perhatian pembaca dan efektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> menyajikan informasi sederhana, jelas, dan akurat → lebih mudah dipahami 	<p>1. Kabupaten Tanah Datar : Tertarik untuk membuat infografis dimanis (video grafis), apakah ada aplikasinya dan apakah BPS dapat membantu untuk memfasilitasi pembuatannya.</p> <p>2. Provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah BPS dapat juga memberi materi terkait penghitungan proyeksi untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai data pelengkap dalam Profil Kependudukan. Secara teknis bagaimana pelaksanaan Sensus 2020 yang 	<p>1. Ada aplikasi khusus untuk pembuatan videografis dan BPS siap membantu apabila ada yang berminat, dan bisa dating langsung ke kantor BPS Sumbar atau kantor BPS di masing-masing Kab/Kota.</p> <p>2. Provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk materi terkait penghitungan proyeksi tidak/belum bisa diberikan dengan adanya keterbatasan waktu, karena untuk belajar menghitung proyeksi dibutuhkan waktu yang lebih lama, namun bagi yang memang ingin belajar, kembali BPS membuka kesempatan untuk bisa langsung dating ke kantor BPS di masing-masing daerah. Sebagai data dasar Sensus akan digunakan data

		<p>b) sesuai dengan keadaan data c) bisa untuk membandingkan, melihat tren, dan melihat perbedaan</p> <p>6. Memperbaiki Grafik agar lebih efektif dan bermakna :</p> <p>a) Buat ukuran yang akurat. b) Urutkan data. c) Hindari feature grafik yang tidak perlu.</p> <p>7. Untuk Sensus Tahun 2020 akan dilakukan sensus dengan combine method dengan bersinergi dengan data Dukcapil menggunakan NIK yang ada, sehingga nantinya data Dukcapil (yang bersifat dejure) dan data BPS (yang bersifat defacto) dapat menjadi satu data dan tidak ada perbedaan lagi.</p> <p>8. Ditampilkan juga contoh-contoh publikasi yang sudah dibuat dan ada di BPS Provinsi Sumatera Barat.</p>	<p>akan dilaksanakan menggunakan combine method, pada akhirnya data mana yang akan digunakan sebagai data penduduk.</p> <p>3. Bukittinggi : Profil Kependudukan harus selesai pada bulan Maret setiap tahunnya, sedangkan publikasi BPS baru keluar bulan Agustus. Bila dibutuhkan data dari BPS, apakah bisa mendapatkan data-data tersebut meskipun publikasi belum resmi dikeluarkan.</p>	<p>penduduk berbasis NIK yang dimiliki Dukcapil, lalu akan dilakukan pengecekan ke lapangan terkait keberadaan penduduk tersebut. Namun sampai saat ini teknis pelaksanaan masih dalam tahap pembahasan di tingkat pusat, dan bila sudah ada ketetapan akan disampaikan ke daerah untuk dilaksanakan.</p> <p>3. Meskipun publikasi belum resmi dikeluarkan, namun bagi siapa saja yang membutuhkan data BPS, dapat datang langsung untuk meminta data-data yang dibutuhkan tersebut.</p>
--	--	--	--	--

D. RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN BIMTEK PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN TAHUN 2019

Rapat evaluasi pelaksanaan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2019 ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2019 di Ruang PIAK dan Pemanfaatan Data dengan tujuan untuk mengetahui apakah Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan yang diadakan telah sesuai dengan yang direncanakan, apakah target Bimtek telah tercapai, dan mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Bimtek untuk perbaikan kedepannya.

Hasil rapat evaluasi pelaksanaan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan ini dituangkan dalam Notulen Rapat sebagaimana terlampir dalam laporan kegiatan ini.

E. TAHAPAN WAKTU PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 ini berlaku satu tahun anggaran, dengan tahapan :

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan						
		Tahun 2018			Tahun 2019			
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Persiapan :							
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB							
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan							
2	Pelaksanaan :							
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan							
	- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Pelaksanaan Kegiatan Bimtek							
	- Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan							
3	Penyelesaian Akhir							
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan							

Dari tahapan pelaksanaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa secara umum semua tahapan waktu pelaksanaan telah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan.

F. REALISASI KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dana untuk menunjang program dan kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat (DAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp.85.630.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) pada kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan dengan Kode Kegiatan 1.02.06.1.02.08.01.099.013, dengan rincian realisasi keuangan sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Jumlah	%	Jumlah	%
5.2.	BELANJA LANGSUNG	85.630.000	85.416.000	99,75	214.000	0,25
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.630.000	85.416.000	99,75	214.000	0,25
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.261.000	4.259.000	99,95	2.000	0,05
5.2.2.01.0001	Belanja Alat Tulis Kantor	882.000	880.000	99,77	2.000	0,23
5.2.2.01.0010	Belanja Seminar Kit Peserta	3.000.000	3.000.000	100,00	0	0,00
5.2.2.01.0012	Belanja Peralatan/ perlengkapan pakai habis	379.000	379.000	100,00	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.304.000	64.304.000	100,00	0	0,00
5.2.2.03.0014	Belanja Jasa Akomodasi	50.000.000	50.000.000	100,00	0	0,00
5.2.2.03.0020	Belanja Transportasi	5.904.000	5.904.000	100,00	0	0,00
5.2.2.03.0035	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000	8.400.000	100,00	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000	725.000	100,00	0	0,00
5.2.2.06.0002	Belanja Penggandaan	725.000	725.000	100,00	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.040.000	1.040.000	100,00	0	0,00
5.2.2.11.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.040.000	1.040.000	100,00	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.300.000	15.088.000	98,61	212.000	1,39
5.2.2.15.0002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.300.000	15.088.000	98,61	212.000	1,39
	TOTAL	85.630.000	85.416.000	99,75	214.000	0,25

Dari tabel realisasi anggaran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Total realisasi anggaran kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.85.416.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah) atau 99,75 persen, dan realisasi fisik 100 persen, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :
 - a. Belanja ATK, yang digunakan untuk menunjang kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.880.000,- (99,77 persen).
 - b. Belanja Seminar Kit Peserta, untuk seminar kit peserta bimtek dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- atau 100 persen dari pagu anggaran.
 - c. Belanja peralatan dan perlengkapan kantor, sama halnya dengan ATK digunakan untuk menunjang kegiatan Bimtek penyusunan Profil Kependudukan, diantaranya adalah spanduk acara, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.379.000,- (100 persen).
 - d. Belanja Jasa Akomodasi, digunakan untuk akomodasi peserta dan Narasumber Bimtek selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- (100 persen).
 - e. Belanja Transportasi, digunakan untuk transport pesawat Narasumber Pusat sebanyak 2 (dua) orang, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.904.000,- atau mencapai 100 persen dari anggaran.
 - f. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, digunakan untuk honor 2 (dua) Narasumber Pusat dan 2 (dua) orang Narasumber Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.400.000,- (100 persen).

- g. Belanja penggandaan, digunakan untuk biaya fotocopy bahan-bahan untuk materi Bimtek, serta laporan dan jilid laporan kegiatan. Adapun realisasi anggaran untuk belanja penggandaan ini adalah sebesar Rp.725.000,- (100 persen).
 - h. Belanja makanan dan minuman rapat, digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rapat persiapan dan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Bimtek Penyusunan Profil, dimana total realisasi anggaran kegiatan rapat ini adalah sebesar Rp.1.040.000,- (100 persen).
 - i. Belanja perjalanan dinas luar daerah, digunakan untuk pendalaman teknis dan koordinasi pelaksanaan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan ke Ditjen Dukcapil Jakarta untuk membahas jadwal, materi, dan metode bimtek dengan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.15.088.000,- (98,61 persen).
2. Berdasarkan uraian realisasi belanja diatas, diketahui bahwa seluruh pagu belanja dapat terserap secara maksimal, sehingga sisa anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah), atau hanya sebesar 0,25 persen, yang merupakan sisa dari belanja ATK dan perjalanan dinas luar daerah.

G. KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Selama pelaksanaan kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 ini, ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

1. Waktu penyelenggaraan Bimtek yang dirasa seluruh peserta masih kurang karena masih banyak teknis pengolahan dan analisa data yang belum dapat disampaikan Narasumber dan diterima oleh seluruh peserta secara detail dan mendalam, dan seluruh peserta berharap agar penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Profil ini dapat dilakukan

dengan langsung melakukan praktek pengolahan, analisa dan penyajian data dengan data masing-masing Kabupaten/Kota.

2. Karena keterbatasan waktu tersebut, Narasumber hanya bisa menyampaikan garis besar cara pengolahan, analisa dan penyajian data saja tanpa bisa dipraktikkan (diaplikasikan) langsung oleh seluruh peserta.

Untuk mengatasi beberapa kendala dan masalah tersebut telah diambil beberapa kebijakan sehingga Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan tetap bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar, yaitu :

1. Dengan waktu Bimtek yang terbatas, para peserta masih melanjutkan diskusi baik dengan Narasumber maupun dengan sesama peserta disela-sela waktu istirahat yang ada.
2. Narasumber khususnya yang berasal dari Pusat dan yang sangat memiliki kompetensi dalam penyusunan Profil Kependudukan ini memberikan kesempatan pada seluruh peserta untuk dapat berkoordinasi dan berkonsultasi langsung dengan Narasumber bila menemui kendala dalam penyusunan Profil Kependudukan masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan memberikan nomor telepon, WA, dan alamat email untuk memudahkan koordinasi dan konsultasi tersebut.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai telah sesuai target baik fisik maupun keuangan. Untuk fisik, kegiatan ini dapat terlaksana 100 persen dengan telah terlaksananya Bimtek tersebut dan seluruh rencana kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar 99,75 persen, dimana seluruh pagu belanja dapat terserap secara maksimal.

Dengan adanya Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Tahun 2019 ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur yang menjadi tim penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disajikan dapat sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Selanjutnya, agar kualitas pengolahan dan analisa data serta penyajian Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota semakin meningkat setiap tahunnya baik dari substansi, sistematika, maupun ketepatan waktu penyelesaian Profil Perkembangan Kependudukan tersebut, maka Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan akan dilakukan setiap tahunnya dan akan dilakukan berbagai usaha agar Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Kependudukan ini dapat dilaksanakan dengan materi dan waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan seluruh peserta.

B. SARAN

Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Sumatera Barat kedepannya, disarankan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menambah waktu pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Kependudukan yang sebelumnya 3 (tiga) hari menjadi paling tidak selama 5 (lima) hari agar selain penyampaian materi dari Narsumber juga dapat langsung dilakukan pengolahan dan analisa data perkembangan kependudukan yang akan disajikan dalam Profil Perkembangan kependudukan masing-masing Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan ini agar tetap dilaksanakan setelah Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II tahun sebelumnya dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri sehingga pada saat Bimtek dilaksanakan, seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi telah dapat membawa data-data yang akan diolah baik yang berasal dari DKB, maupun data pendukung dari instansi terkait lainnya.
3. Dengan melakukan pengolahan data langsung pada saat Bimtek, diharapkan dapat langsung juga dilakukan verifikasi dan validasi data antara data yang diolah Provinsi dan data yang diolah Kabupaten/Kota sehingga saat kembali dari Bimtek, masing-masing Tim Penyusunan dari Kabupaten/Kota dan Provinsi tinggal melakukan finalisasi draft Profil Kependudukan saja.
4. Bila semua dapat terlaksana dengan baik pada saat Bimtek, diharapkan ketepatan waktu penyelesaian dan penyajian Profil Kependudukan untuk Kabupaten/Kota yaitu bulan Maret dapat tercapai dan terwujud.